


Dampak Rent Seeking terhadap Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah: Studi Kasus OTT Gubernur Riau Flyover

Zackya Hayati Lubis¹, Olivia Damayanti Marpaung², Claudia Tabitha Panjaitan³, Helena Seprina Sitohang⁴, Renaldi Enriko Sigalingging⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

E-mail: zackyahayatilubis4@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5170>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Dec 2025

Revised: 28 Dec 2025

Accepted: 23 Jan 2026

Kata Kunci:

Strategi, Perusahaan Publik Regional (PUD), Tingkat Hunian, Pasar Tradisional, SW

Keywords:

Strategy, Regional Public Company (PUD), Occupancy, Traditional Market, SWOT.



ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis pengaruh praktik rent-seeking terhadap efektivitas kebijakan pembangunan daerah melalui studi kasus OTT Gubernur Riau terkait proyek flyover di bawah Dinas PUPR. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi dokumen, penelitian ini menelaah putusan hukum, laporan resmi, arsip media, dan literatur akademik untuk mengidentifikasi pola distorsi kebijakan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan proyek infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rent-seeking muncul secara sistemik melalui desain proyek yang tidak berbasis kebutuhan publik, proses tender non-kompetitif yang melibatkan kolusi birokrat-kontraktor, serta pelaksanaan proyek yang menghasilkan kualitas rendah dan pembengkakan biaya. Praktik ini menyebabkan misalokasi sumber daya, inefisiensi anggaran, dan penurunan manfaat sosial dari proyek infrastruktur. Selain itu, kelemahan tata kelola seperti minim transparansi, lemahnya pengawasan, dan rendahnya akuntabilitas menjadi faktor yang memperkuat terjadinya rent-seeking. Penelitian menegaskan bahwa rent-seeking tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Diperlukan penguatan tata kelola, transparansi, dan mekanisme pengawasan untuk mencegah distorsi kepentingan dalam proyek pembangunan daerah.

This study examines the impact of rent-seeking practices on the effectiveness of regional development policies through a case study of the Corruption Eradication Commission's sting operation involving the Governor of Riau in the flyover project under the Public Works and Spatial Planning Agency. Using a qualitative approach based on document analysis, the research reviews legal rulings, official government reports, media archives, and academic literature to identify distortions in policy processes related to planning, budgeting, and procurement. The findings indicate that rent-seeking emerges systematically through project designs misaligned with public needs, non-competitive tenders involving bureaucrat-contractor collusion, and implementation outcomes characterized by inflated costs and poor construction quality. These practices lead to resource misallocation, budget inefficiency, and reduced social benefits of infrastructure projects. Institutional weaknesses such as low transparency, weak oversight, and limited accountability further enable rent-seeking to persist. The study concludes that rent-seeking not only generates economic losses but also undermines public trust in regional governance. Strengthening governance mechanisms, enhancing transparency, and improving oversight are essential to preventing policy distortion in regional development projects.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Zackya Hayati Lubis et al (2026). Dampak Rent Seeking terhadap Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah: Studi Kasus OTT Gubernur Riau Flyover. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5170>

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur publik di daerah seperti jalan, jembatan, dan flyover sering dipandang sebagai salah satu pilar utama untuk mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dan memperluas akses layanan publik bagi masyarakat. Namun demikian, keberhasilan kebijakan pembangunan semacam itu sangat bergantung pada kualitas tata kelola, mulai dari perencanaan, alokasi anggaran, pelaksanaan proyek, hingga mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Dalam hal ini, praktik *rent-seeking* dapat muncul sebagai ancaman serius terhadap efektivitas pembangunan. *Rent-seeking* terjadi ketika birokrat, politikus, maupun pelaku swasta menggunakan posisi kekuasaan atau akses terhadap proses penganggaran dan kebijakan publik untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, bukan melalui peningkatan produktivitas atau pelayanan publik, melainkan melalui jalur non-produktif seperti kolusi, lobi, suap, atau manipulasi keputusan kebijakan.

Beberapa penelitian *rent-seeking* menunjukkan bahwa praktik ini bukan sekadar teori abstrak, melainkan kenyataan empiris di banyak pemerintahan daerah di Indonesia. (Sumarti et al., n.d.) menjelaskan bahwa proses penyusunan kebijakan anggaran di beberapa daerah melibatkan “bribery, corruption, collusion, lobbying, negotiation, and transactional politics between regional leaders, bureaucrats, private actors, and political brokers.” dimana praktik *rent-seeking* melalui kebijakan informal ini terbukti berkorelasi kuat dengan kasus korupsi di tingkat pemerintah daerah. (Kelola et al., 2021) menemukan bahwa perilaku *rent-seeking* yang terjadi dalam proses alokasi anggaran merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada buruknya kinerja pemerintah daerah dan analisis terhadap local governance di ratusan kabupaten/kota juga menunjukkan bahwa pemerintahan dengan tata kelola lemah cenderung memiliki lebih banyak kasus non-kompliansi dan pelanggaran yang dapat dianggap sebagai indikasi praktik korupsi atau *rent-seeking*. Hal ini juga diperkuat oleh (Infrastruktur, 2018) bahwa *rent-seeking* mempengaruhi alokasi dana, kualitas pelaksanaan, serta distribusi manfaat pembangunan, semestinya proyek infrastruktur memberikan manfaat publik luas, namun dalam praktiknya bisa terdistorsi menjadi alat akumulasi rente bagi segelintir elit.

Dampak negatif dari *rent-seeking* terhadap pembangunan publik sangat nyata. Dalam sektor infrastruktur, *rent-seeking* sering berujung pada inefisiensi penggunaan anggaran, pembengkakan biaya proyek, kualitas pekerjaan yang rendah, serta manfaat publik yang jauh dari harapan. (Al Hakim, dkk, 2015) menunjukkan bahwa biaya transaksi dan korupsi akibat *rent-seeking* menyebabkan adanya kebocoran anggaran, markup biaya kontrak, serta kehilangan potensi pembangunan yang cukup besar. Begitu pula dalam sektor pelabuhan, (Nugraha, R. H. A., & Damanhuri, D. S., 2018) menemukan bahwa meskipun proyek memiliki potensi strategis bagi pembangunan ekonomi, praktik *rent-seeking* dan korupsi memunculkan “pembelegungan dana, penyalahgunaan wewenang, kolusi birokrat-perusahaan,” sehingga manfaat bagi publik menjadi sangat minim.

Perspektif ekonomi politik terhadap *rent-seeking* mengingatkan bahwa ketika kekuasaan publik dan alokasi anggaran berada di tangan pejabat yang memiliki insentif oportunistik, maka penyaluran rente menjadi tujuan utama. Konsekuensinya, sumber daya publik diserap untuk kepentingan segelintir elit yang pada akhirnya merusak kesejahteraan sosial dan memperbesar ketimpangan. Fenomena-fenomena tersebut menjadi relevan kembali ketika muncul peristiwa nyata di mana pejabat tinggi daerah diduga terlibat skema korupsi dalam proyek infrastruktur, khususnya pada kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan dinas pembangunan daerah (khususnya dinas PUPR), mengindikasikan bahwa prosedur proyek infrastruktur seperti flyover ataupun proyek fisik lainnya rentan terhadap praktik korupsi dan *rent-seeking*.

Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menggali bagaimana *rent-seeking* terstruktur dalam proses kebijakan pembangunan dan bagaimana hal itu memengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan serta kesejahteraan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme *rent-seeking* dalam kebijakan pembangunan daerah, dampaknya terhadap kualitas, efisiensi, dan manfaat proyek bagi publik, serta bagaimana praktik tersebut bisa dicegah melalui tata kelola, transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas. Harapannya, hasil penelitian dapat memperkaya literatur ekonomi publik dan kebijakan fiskal daerah, serta menjadi bahan pertimbangan bagi perbaikan sistem pengelolaan pembangunan infrastruktur di Indonesia agar proyek publik tidak berubah menjadi alat perburuan rente semata.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menelaah secara mendalam bagaimana praktik rent seeking memengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau yang berkaitan dengan proyek flyover di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pendekatan ini dipilih karena fenomena rent seeking tidak dapat dipahami hanya melalui data kuantitatif atau indikator pembangunan yang bersifat teknokratis; sebaliknya, fenomena tersebut melekat pada relasi kekuasaan, proses kebijakan, dan dinamika politik-administratif yang perlu dianalisis secara interpretatif. Seluruh data dalam penelitian ini dihimpun melalui desk research dan studi dokumen yang mencakup berbagai sumber sekunder. Pemanfaatan data sekunder dilakukan karena kasus OTT tersebut telah terdokumentasi luas dalam putusan hukum, laporan resmi lembaga negara, arsip media, serta kajian ilmiah yang relevan. Data berupa artikel jurnal dijadikan dasar untuk memahami teori-teori rent seeking, tata kelola pemerintahan daerah, korupsi birokrasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan. Berita media dan laporan investigatif dari sumber-sumber kredibel melengkapi data tersebut dengan memberikan konteks kronologis, dinamika politik, serta informasi yang tidak terekam dalam dokumen hukum formal.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur akademik dari basis data nasional dan internasional, pengunduhan dokumen hukum dari situs resmi lembaga peradilan dan antikorupsi, serta pencarian arsip berita yang relevan dengan perkembangan kasus. Setiap dokumen diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap pemahaman mengenai relasi antara rent seeking dan kebijakan pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti merangkai gambaran utuh mengenai proses kebijakan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, sekaligus mengidentifikasi titik-titik rawan yang menjadi celah bagi distorsi kepentingan.

Analisis data dilakukan melalui analisis konten dan analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu membaca, mengidentifikasi, serta menyaring informasi dari seluruh dokumen untuk menemukan tema-tema kunci seperti peran aktor politik dan birokrasi, bentuk-bentuk intervensi kepentingan, mekanisme penyimpangan dalam pengadaan, serta dampaknya terhadap efektivitas kebijakan. Proses ini dilanjutkan dengan pengodean manual untuk mengelompokkan informasi berdasarkan pola tertentu. Setelah itu, hasil reduksi disusun ke dalam bentuk sajian data yang lebih terstruktur melalui perumusan tema, pembuatan matriks konsep, serta pemetaan relasi antarfaktor. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan melalui verifikasi terus-menerus antara temuan dokumen dan kerangka teoretis, sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak semata berdasarkan satu jenis sumber, melainkan merupakan sintesis dari berbagai dokumen yang saling melengkapi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari jurnal ilmiah, laporan resmi, putusan hukum, dokumen kebijakan, dan berita media. Triangulasi ini penting dilakukan karena masing-masing jenis dokumen memiliki kepentingan, sudut pandang, dan potensi bias yang berbeda. Validitas konstruksi juga diperkuat dengan memastikan bahwa kategori konseptual yang digunakan dalam analisis sesuai dengan teori rent seeking dan tata kelola kebijakan publik yang telah berkembang dalam literatur.

Penelitian ini memiliki batasan metodologis yang perlu dicatat secara akademik. Tidak dilakukannya pengambilan data primer melalui wawancara atau observasi lapangan menyebabkan penelitian ini tidak dapat menangkap dimensi subjektif para aktor, dinamika informal dalam pengambilan keputusan, maupun konteks relasional yang tidak tercatat dalam dokumen. Ketergantungan pada data sekunder juga membuka kemungkinan ketidaksempurnaan informasi, terutama jika sebagian peristiwa tidak sepenuhnya dilaporkan atau jika dokumen tertentu tidak tersedia publik. Selain itu, berita media yang digunakan tetap memiliki potensi framing, sehingga perlu dibaca secara kritis dan dikonfirmasi melalui sumber lain. Meskipun memiliki keterbatasan tersebut, studi berbasis dokumen tetap memberikan landasan analitis yang kuat karena kasus OTT Gubernur Riau merupakan peristiwa hukum yang terdokumentasi secara rinci dan memiliki jejak informasi publik yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pajak dan Kebijakan Fiskal dalam Kesejahteraan Masyarakat

Pajak memainkan posisi yang sangat fundamental dalam struktur ekonomi negara karena menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk menyediakan layanan publik. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, negara tidak dapat menjalankan berbagai fungsi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Pajak membiayai sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, layanan sosial, serta program-program publik lainnya yang menjadi fondasi utama kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh (Sirait & Lie, 2025) efektivitas pengelolaan pajak menjadi faktor penentu keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Tidak hanya jumlah penerimaannya yang penting, tetapi bagaimana pajak tersebut dikelola dan dialokasikan ke sektor-sektor prioritas sangat memengaruhi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.

Ketika pajak dikelola secara akuntabel dan diterapkan secara tepat sasaran, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih mudah dicapai. Masyarakat dapat melihat wujud nyata kontribusi pajak melalui peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan sekolah, perbaikan layanan transportasi, serta berbagai bentuk infrastruktur lainnya yang secara langsung meningkatkan standar hidup. Pada level daerah, peran pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak kalah penting. (Stepani et al., 2024) menyebutkan bahwa PAD yang optimal memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi pemerintah daerah. PAD yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal tanpa tergantung sepenuhnya pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Kemandirian daerah dalam pembangunan menjadi aspek penting dalam kerangka otonomi daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh suatu daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memperbaiki layanan publik, membangun infrastruktur, dan memperkuat program kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan PAD tidak hanya menambah kapasitas fiskal, tetapi juga menjadi indikator kematangan tata kelola keuangan daerah. Pada akhirnya, peran pajak dan kebijakan fiskal berkontribusi dalam membangun fondasi kesejahteraan masyarakat yang kuat, memperkuat stabilitas ekonomi, dan memastikan terwujudnya pembangunan yang berkeadilan.

Pajak, Pertumbuhan Ekonomi, dan Dampaknya terhadap Kemakmuran

Hubungan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi merupakan tema penting dalam literatur ekonomi. (Informasi et al., 2018) menegaskan bahwa ketika penerimaan pajak meningkat dan dikelola secara efektif, pemerintah dapat memperluas investasi publik yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang dibiayai oleh pajak membantu menciptakan konektivitas yang lebih baik antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa. Infrastruktur publik yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi yang lebih dinamis.

Investasi pada infrastruktur seperti jaringan jalan, transportasi umum, irigasi, dan fasilitas publik lainnya mampu memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat sehingga produktivitas regional meningkat. Infrastruktur yang lebih baik membantu mengurangi hambatan dalam aktivitas perdagangan dan memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Dengan kata lain, pajak menjadi mesin fiskal yang menggerakkan pembangunan, yang pada gilirannya berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Pandangan yang dikemukakan (Purba, 2023) memperluas pemahaman ini dengan melihat pajak sebagai bagian esensial dari struktur pendapatan negara yang terintegrasi dengan pendapatan sumber daya alam (SDA). Di Indonesia, kedua sumber pendapatan ini sering kali menjadi pilar penting yang menopang kapasitas fiskal nasional. Ketika pendapatan pajak dan pendapatan SDA berjalan optimal dan saling melengkapi, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk memperluas belanja yang produktif, seperti belanja modal, belanja sosial, dan belanja pembangunan sektor-sektor strategis.

Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pajak menciptakan efek berantai yang signifikan. Peningkatan pendapatan negara memungkinkan pemerintah memperkuat kebijakan sosial seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sehingga memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan kesempatan kerja, memperluas basis penerimaan pajak, dan pada akhirnya memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Dengan demikian, pajak tidak hanya

berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan nasional yang mendorong kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.

Fungsi Pajak dalam Infrastruktur, Redistribusi Sosial, dan Tantangan dalam Implementasinya

Selain menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan redistribusi sosial. (Sirait & Lie, 2025) menjelaskan bahwa pajak menjadi alat bagi pemerintah untuk menyediakan layanan dasar secara merata. Melalui redistribusi fiskal, pemerintah dapat memastikan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan program jaminan sosial. Tanpa pajak yang kuat, layanan penting ini tidak akan dapat menjangkau masyarakat secara luas, sehingga kesenjangan sosial tidak dapat ditekan. Pajak juga menjadi sumber utama pendanaan untuk pembangunan infrastruktur berskala besar. (Simamora et al., 2024) menegaskan bahwa dana pajak yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur daerah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembangunan regional. Pembangunan fasilitas transportasi, jalan, jembatan, dan sarana umum lainnya meningkatkan daya saing daerah serta mempercepat integrasi ekonomi antarwilayah. Infrastruktur yang memadai memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik secara lebih mudah dan efisien.

Namun, pelaksanaan kebijakan pajak di negara berkembang tidak selalu berjalan mulus. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya kepatuhan pajak dan lemahnya administrasi perpajakan. Minimnya literasi perpajakan di kalangan wajib pajak turut memperburuk posisi penerimaan negara. Banyak masyarakat belum memahami secara penuh manfaat pajak bagi kesejahteraan bersama. (Umar & Tusubira, 2017) menunjukkan bahwa hambatan administratif dan rendahnya pengetahuan pajak menyebabkan potensi penerimaan negara tidak tergalai secara optimal. Selain itu, kebijakan pajak seperti perubahan tarif PPN harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat tertentu, terutama mereka yang berpendapatan rendah. (Tinggi et al., 2025) menegaskan bahwa perubahan tarif pajak dapat meningkatkan beban ekonomi masyarakat kecil melalui kenaikan harga barang konsumsi. Oleh karena itu, kebijakan pajak harus dirancang dengan memperhatikan keadilan distributif dan dampaknya terhadap kesejahteraan.

Berbagai tantangan dalam pengelolaan pajak semakin terlihat nyata dalam kasus proyek infrastruktur daerah seperti pembangunan flyover/PUPR yang berujung pada OTT pejabat daerah. Kasus tersebut memperlihatkan dengan sangat jelas pola rent-seeking sebagaimana dijelaskan dalam literatur ekonomi klasik oleh Tullock (1967) dan Krueger (1974). Dalam kasus ini, proses perencanaan proyek tampaknya tidak disusun berdasarkan kebutuhan publik semata, melainkan untuk menciptakan peluang rente bagi pihak tertentu. Spesifikasi proyek dan estimasi anggaran dirancang agar memberikan margin keuntungan yang besar bagi aktor-aktor yang terlibat, meskipun tidak memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat. Proses tender yang seharusnya berlangsung kompetitif justru diwarnai kolusi antara birokrat dan kontraktor, sebagaimana dijelaskan dalam kajian OECD (2010) dan Auriol (2015). Kontraktor tertentu memenangkan tender secara konsisten tanpa persaingan sehat, sementara transparansi proses hampir tidak ada. Markup anggaran yang besar berbanding terbalik dengan kualitas hasil pekerjaan yang buruk, menunjukkan bahwa proyek tersebut dirancang sebagai sarana pemburuan rente dan bukan sebagai pelayanan publik.

Akibatnya, masyarakat menanggung kerugian sosial yang sangat besar. Infrastruktur yang dibangun tidak memenuhi standar teknis, manfaatnya jauh dari optimal, dan anggaran publik terbuang sia-sia. Literatur dan studi empiris menunjukkan bahwa korupsi dan rent-seeking dalam proyek infrastruktur berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, efisiensi investasi publik, serta kualitas layanan publik. Situasi ini mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan dan pengawasan, sebagaimana dijelaskan Börner et al. (2007), di mana institusi yang lemah menjadi lahan subur bagi praktik rent-seeking. Dampak sosial-politiknya pun tidak bisa diabaikan. Rent-seeking dan korupsi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menciptakan ketidaksetaraan manfaat pembangunan. Ketika warga melihat bahwa proyek publik tidak memberikan manfaat nyata dan justru menguntungkan kelompok elite, legitimasi pemerintah melemah. Selain itu, distorsi alokasi anggaran mengurangi investasi pada sektor yang jauh lebih dibutuhkan seperti kesehatan dan pendidikan. Pajak dan belanja publik yang ideal seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan. Namun, tanpa tata kelola yang baik, pajak dapat berubah menjadi sumber rente yang merugikan masyarakat. Reformasi kelembagaan, penguatan pengawasan, transparansi tender, serta

profesionalisasi birokrasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa fungsi pajak benar-benar berjalan sesuai tujuan pembangunan nasional.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik rent-seeking memiliki pengaruh signifikan terhadap kegagalan efektivitas kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana terlihat pada kasus proyek flyover di Riau. Rent-seeking muncul secara terstruktur dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan melalui kolusi birokrat-kontraktor, tender non-kompetitif, serta markup anggaran yang berujung pada rendahnya kualitas infrastruktur dan hilangnya manfaat publik. Kelemahan tata Kelola, seperti minim transparansi, lemahnya sistem pengawasan, dan rendahnya akuntabilitas akan memperkuat berlangsungnya distorsi kepentingan tersebut dan turut menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu memperkuat tata kelola melalui transparansi dokumen perencanaan dan pengadaan, optimalisasi e-procurement, serta audit independen untuk memastikan proses berjalan kompetitif dan akuntabel. Reformasi birokrasi, peningkatan profesionalisme aparatur, serta penegakan sanksi terhadap pelaku kolusi diperlukan guna menutup celah rent-seeking. Di samping itu, peningkatan partisipasi publik dan pengawasan eksternal menjadi strategi penting untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, bersih, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Alhasymi Matondang, M.E., selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Publik, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, dan bantuan sehingga penelitian serta penyusunan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Al Hakim, I. (2015). Rent-seeking dan korupsi dalam pembangunan jalan di Indonesia (Studi kasus: dua masa pemerintahan SBY, 2004-2013) [Undergraduate thesis, IPB University]. IPB Repository. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/75503>
- Informasi, S., Dan, A., & Indonesia, E. D. I. (2018). *Sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan*. 3(1), 17–27.
- Infrastruktur, R. D. A. N. P. (2018). *No Title*.
- Kelola, T., Akuntabilitas, D. A. N., Negara, K., & Permadi, B. I. (2021). *Rent - Seeking , Political Budget Cycle , and Audit Opinion : An Analysis of Local Government Spending in Indonesia*. 7(2), 211–228. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i2.737>
- Purba, B. (2023). *TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA*. 2(2), 1–5.
- Simamora, S. I., Sinaga, E. D., Manik, E., Gunana, E. M., Matondang, K., Infrastruktur, P., Pajak, K., Anggaran, P., Indonesia, E., & Perpajakan, K. (2024). *PERAN PAJAK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA : ANALISIS*. 7, 17484–17487.
- Sirait, M. V., & Lie, G. (2025). *Konsep Regulasi Dan Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*. 24(1), 124–139.
- Stepani, G., Hartika, D., Balqis, S., Pika, D., & Batu, L. (2024). *Analisis Dampak Pajak Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. 8, 22612–22618.
- Sumarti, T., Damanhuri, D. S., Sjaf, S., Law, V., Government, V., Rosadah, R. A., Iqbal, M., Samadi, B., Government, N. I. S., Nomaini, F., Effendi, S., Bafadhal, O. M., Dwi, A., Nurhadianto, T., Sugiri, S., & Hajad, V. (n.d.). *Civil Society*.
- Tinggi, S., Ekonomi, I., Dharmas, S., & Pekanbaru, P. (2025). *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi | JIMBE* <https://malaqbiipublisher.com/index.php/JIMBE>. 3(1), 1–13.
- Umar, M. A., & Tusubira, N. F. (2017). *CHALLENGES OF TAX ADMINISTRATION IN DEVELOPING COUNTRIES : INSIGHTS FROM THE 5TH ANNUAL TAX ADMINISTRATION*

Socialization of the Use of Smart TVs as a Means of Improving Communication Quality and as a Learning Medium in Indonesia's 3T Regions, Winda Fashihah, Kemmala Dewi, Wakhilah Dwi Khusnah , Ida Wahyu Wijayati, Aris Krisdiyanto 18398

RESEARCH CENTRE WORKSHOP , 2017 . 3, 108–123.